

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daldjoeni (2011:4), menyatakan Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 416 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2020 adalah 83.381 Desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam perjalanannya desa mendapat pengakuan dengan adanya Undang-undang Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang Desa diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumhan Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Menurut Azwar (2001:6), menyatakan bahwa: “ Rakyat Indonesia mayoritas ada di pedesaan, secara statistik jumlah mereka yang ada di pedesaan sekitar 60-80% dari jumlah penduduk ”. Hal ini dapat dipastikan bahwa desa memiliki potensi yang sangat penting dalam bidang pertanian maupun tenaga kerja, demikian juga dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di desa sudah semestinya pembangunan yang ada di desa ditingkatkan.

Mondong (2013).Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat perdesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Kepala Desa berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena masyarakat juga bagian dari suksesnya program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan. Suminar(2015).

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga, maupun daerah, dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan sebagai bagian dalam pola manajerial pembangunan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan

yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan desa sangat dibutuhkan swadaya dari anggota masyarakat yaitu kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk uang maupun benda yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan program pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, akan dapat menimbulkan banyaknya program pembangunan yang dicapai, pelayanan dapat diberikan dengan baik, dapat mendorong timbulnya rasa tanggung jawab, menjamin bahwa pekerjaan dapat diarahkan dengan benar, membebaskan dari ketergantungan kepada orang lain, dan dengan partisipasi dapat menimbulkan kesadaran orang lain untuk mengatasi kemiskinan dan cara mengatasinya. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan, Kepala Desa dituntut untuk dapat membawa masyarakat di lingkungannya untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan.

Pemerintah Desa Wae-mbeleng dalam meningkatkan aksebilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian

lebih pemerintah Desa Wae-mbeleng adalah perbaikan jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Bintarto (1983) Alasan mengapa pembangunan infrastruktur jalan itu penting yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pembangunan infrastruktur jalan dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Dengan membangun atau memperbaiki prasarana transportasi akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat.
4. Meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan.

pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan, sebaliknya suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Sama halnya bagi masyarakat Desa Wae-mbeleng pembangunan infrastruktur jalan yang memadai sangat penting, dimana dengan adanya infrastruktur jalan yang baik maka kesejahteraan masyarakat Desa Wae-mbeleng dapat meningkat, serta perekonomiannya juga meningkat. Contohnya di mana masyarakat Desa Wae-mbeleng dengan adanya akses jalan yang baik maka mereka dapat dengan mudah menjual hasil panen yang mereka punya di tempat lain. Namun pada kenyataannya ketersediaan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng masih belum memadai, dimana di beberapa ruas jalan Desa Wae-mbeleng sudah terjadi kerusakan yang

cukup parah serta masih ada juga jalan yang masih berupa batu dan belum di aspal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Kondisi infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng,Kecamatan Ruteng,Kabupaten
Manggarai Tahun 2017-Tahun 2019

No	Urian	Tahun (km)		
		2017	2018	2019
1.	Jenis permukaan jalan			
	a. Aspal	3,74	3,74	3,74
	b. Pasir Batu	1,00	1,00	0,00
	c. Tanah	-	-	-
	d. Tidak dirinci	-	-	-
	Jumlah	4,74	4,74	3,74
2.	Kondisi jalan			
	a. Baik	2,74	2,74	2,74
	b. Sedang	1,00	1,00	1,00
	c. Rusak ringan	1,00	1,00	1,00
	d. Rusak berat	-	-	-
	Jumlah	4,74	4,74	4,74

Sumber : Kantor Desa Wae-mbeleng 2019

Desa Wae-mbeleng memiliki orbitasi waktu tempuh dan jarak ke ibu kota Kecamatan: 10 Km Lama jarak tempuh ke Kecamatan dengan Kendaraan roda dua (2) : 22 menit,dengan kendaraan roda empat (4) :24 menit,dan jika berjalan kaki :1 jam 59 menit.serta waktu tempuh dan jarak dari Desa Wae-mbeleng ke Kabupaten : 16 km lama jarak tempuh dengan kendaraan roda dua (2) :31menit,dengan kendaraan roda empat (4) :33 menit dan jika berjalan kaki : 3 jam 16 menit.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng masih sangat minim. Ini terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa pembangunan desa adalah merupakan tugas aparat pemerintah desa saja dan masyarakat hanya menikmati, serta jika diadakan rapat atau gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat untuk turut serta masih kurang dengan alasan ada pekerjaan lain yang mereka pentingkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal dalam hal ini partisipasi masyarakat seperti saran, pikiran, dan tenaga mereka sangat dibutuhkan. hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja pembangunan di Desa Wae-mbeleng masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa pasir batu yang sulit untuk dilalui. hal ini juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa melalui telepon pada tanggal 15 maret 2020, yang mengatakan bahwa “ *dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng tingkat partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan tenaga masih sangat kurang, mereka menganggap bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukanlah tugas mereka melainkan tugas pemerintah*”.

Tabel 1.2
prosedur pengadaan infrastruktur jalan di desa Wae-mbeleng, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Perencanaan	Perencanaan pengadaan diawali dengan identifikasi masalah dan diakiri dengan publikasi dokumen pengadaan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam tahap prosedur pengadaan.
Tahap penjelasan	Dimana pada tahap ini pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diijinkan

Tahap pelaksanaan	Pada tahap ini adalah mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan terlebih dahulu
Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan	Pada tahap ini bertujuan untuk menjamin agar pembangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya.

Sumber Kantor Desa Wae-mbeleng (2022)

Dalam hal ini peran Kepala Desa sebagai seorang pemimpin di Desa Wae-mbeleng sangat di butuhkan, agar bisa lebih memotivasi, serta meningkatkan partisipasi seluruh warga masyarakat desanya agar selalu kompak dalam hal apapun demi kemajuan dan berkembangnya Desa Wae-mbeleng sendiri.

Tabel 1.3
Tingkat partisipasi masyarakat Desa Wae-mbeleng,
Kecamatan Ruteng,Kabupaten Manggarai.

No	Partisipasi masyarakat	Tingkat partisipasi
1.	Partisipasi berupa uang,bentuk partisipasi untuk memperlancar pembangunan	Rendah
2.	Harta benda	Sedang
3.	Tenaga	Sedang
4.	Buah pikiran	Sedang
5.	Partiasipasi dalam pengambilan keputusan	Sedang

Sumber Dokumen Notulen Rapat Dalam Pertemuan Musrembang Desa Wae-Mbeleng (2020)

Pada tabel 1.2 dan 1.3 di atas dapat dilihat bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,hal ini dapat dilihat dari beberapa prosedur pengadaan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbekeng diatas yang

membutuhkan keikutsertaan masyarakatnya. Berikut ini beberapa peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng :

➤ Perencanaan

Dalam tahap ini masyarakat diharapkan dapat memberikan buah pikiran serta pengambilan keputusan melalui musyawarah desa terkait dengan pembangunan jalan di Desa Wae-mbeleng.

➤ Perancangan

Pada tahap ini juga masyarakat diharapkan dapat memberikan buah pikiran untuk dapat melakukan perancangan yang lebih mendetail.

➤ Pelaksanaan

Dalam tahap ini masyarakat diharapkan dapat menyumbangkan tenaga dalam pembangunan jalan di Desa Wae-mbeleng.

Melihat hal tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Wae-mbeleng Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wae-mbeleng, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut ;

1. Bagi perkembangan teori

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan temuan tentang peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini juga membawa manfaat bagi perkembangan wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri terkait dengan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi.

2. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah Desa Wae-mbeleng terkait dengan peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang

pembangunan infrastruktur jalan serta memberikan wawasan ilmiah kepada masyarakat terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Untuk penelitian lanjutan

pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang juga mengambil topik yang sama seperti penulis. Penelitian ini juga menambah bahan kepustakaan dan bahan bacaan bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai pemenuhan syarat-syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik.